

Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Muhammad Salisul Khakim

Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia
email: muhammad.salis@unisayogya.ac.id

Citation:

Khakim, M, S.(2023). Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1), 98-116. Prefix [10.47134](https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/index)

Received: January, 2023

Accepted: March, 2023

Published: April, 2023

Publisher's Note: Indonesian Journal Publisher ID-Publishing, stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations



Copyright: © 2023 by the authors. Licensee Indonesian Journal Publisher ID-Publishing, Yogyakarta, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). (Platino Linotype, 9pt, di isi editor).

Abstrak:. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan partisipasi politik generasi muda dalam mempersiapkan pemilihan umum tahun 2024. Partisipasi politik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari modernisasi, kelas sosial, intelektual, konflik elit, hingga keputusan politik. Faktor partisipasi politik menentukan kualitas elit politik yang akan memimpin negara di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan melalui kuesioner yang mempengaruhi pengaruh partisipasi politik bagi generasi muda terhadap pemilu. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran generasi muda memiliki peran partisipasi politik yang cukup tinggi, yaitu sebagai upaya utama untuk mengubah peran negara menjadi lebih baik. Namun, yang perlu dipersiapkan saat ini bukan hanya melakukan sosialisasi dan edukasi politik tentang penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum tahun 2024, tetapi yang lebih penting adalah pemahaman tentang orientasi dan proyeksi partai politik dan tokoh politik yang akan mengisi konstelasi negara yang lebih baik di masa depan.

Kata kunci: Generasi Muda, Partisipasi Politik, Pemilihan Umum.

Abstract:. This study aims to explain the political participation of the younger generation in preparing for the general election in 2024. This political participation is influenced by several factors, ranging from modernization, social class, intellectuals, elite conflict, to political decisions. Factors in political participation determine the quality of the political elite who will lead the country in the future. This study uses a qualitative and quantitative approach, with data collection through literature studies and through questionnaires that affect the influence of political participation for the younger generation on elections. This study shows that the role of the younger generation has a fairly high political participation role, namely as the main effort to change the role of the country for the better. However, what needs to be prepared at this time is not only to carry out socialization and political education on the use of voting rights in the general election in 2024, but what is more important is an understanding of the orientation and projections of political parties and political figures who will fill the constellation of a better state in the future

Keywords: Young Generation, Political Participation, General Election

1. Pembahasan

Data partisipasi politik pada pemilu serentak 2019 mencapai 81,97% pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan partisipasi politik mencapai 81,67% pada Pemilihan Legislatif. Pada pemilu sebelumnya, partisipasi politik dalam pemilu tahun 2014 hanya mencapai 70% untuk Pemilihan Presiden, sedangkan dalam Pemilihan Legislatif hanya mencapai 75%. (Fariska, 2019) Tingginya persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dibandingkan dengan pemilihan legislatif dikarenakan mayoritas aspek yang diliput media adalah pemilihan presiden. Sehingga banyak masyarakat asal pilih maupun golput dalam pemilihan legislatif. Pemilih sulit untuk memberikan rasionalitas dalam memberikan suara akibat terlalu banyaknya pilihan atau surat suara (Amir, 2020).

Dalam menentukan pilihan politiknya, pemilih pemula sering terpengaruh oleh pilihan orang-orang di sekitarnya seperti keluarga dan teman sekelompoknya. Para pemilih pemula ini khususnya yang tinggal di pedesaan, mayoritas mengikuti sikap orang tuanya atau tokoh yang dihormati di lingkungannya. Dalam kaitannya dengan pilihan terhadap partai politik, pemilih pemula ini cenderung meneruskan tradisi keluarga dengan memilih partai politik yang selama ini telah dipilih secara turun menurun oleh keluarganya dari generasi ke generasi. Sementara itu, dalam memilih calon legislatif, kaum pemilih pemula ini cenderung memilih figur yang terkenal meskipun mereka tahu lebih lanjut tentang latar belakang dan visi misi caleg tersebut. (Yustiningrum dan Ichwanuddin, 2014) Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melihat bahwa partisipasi politik pada generasi muda memiliki pengaruh dalam penentuan elit politik pada pemilu 2024, namun partisipasi politik bukan hanya menitikberatkan pada jumlah kuantitas pemilih melainkan juga kualitas pemahaman pemilih.

Dalam hal partisipasi politik, generasi milenial tentu sangat berpengaruh karena dari persentase jumlah pemilih, generasi milenial menyumbang suara cukup banyak dalam keberlangsungan Pilkada 2020 ini. Kepentingan elit politik yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan aktivitas politik, lebih mementingkan kepentingan golongan dan terkesan menghambat keterlibatan pemuda/ milenial dengan ideologi yang dibawa. Dengan peran generasi

milennial sebagai pemilih yang memiliki sumbangsih terhadap suara hasil pemilihan yang cukup besar, maka posisi generasi milenial menjadi sangat strategis. Penciptaan tatanan pemerintahan lokal yang baik secara empirik, menurut Hanafi (2014), menekankan pentingnya peran warga negara. Untuk mengukur peran warga dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik, pemahaman terhadap agregasi kepentingan, dan pertanggungjawaban publik.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan model pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit (Moleong, 2012: 6). Pendekatan kualitatif ini dijelaskan dengan metode deskriptif, yang diartikan menurut Nawawi (2012: 67) sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Nawawi (2012:167) menjelaskan bahwa teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian disebut sebagai teknik purposive sampling, yaitu sampel atau informan yang sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan tersebut. Teknik ini menentukan bahwa informan yang menjadi obyek dalam penelitian ini meliputi para mahasiswa, tokoh pemuda, dan perguruan tinggi yang menjadi lembaga pendidikan bagi generasi milenial tersebut.

Teknik pegumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada sumber primer dan sekunder, dengan menentukan informan penelitian yang representatif sesuai dengan obyek penelitian. Menurut Moleong (2012: 157), data utama/primer bersumber dari hasil wawancara dan pengamatan dengan upaya kegiatan melihat, mendengar dan bertanya, yang dilakukan pada obyek penelitian. Data kedua/sekunder bersumber dari sumber tertulis seperti buku dan majalah ilmiah, arsip,

dokumen pribadi, dan dokumen resmi terkait dengan Partisipasi politik generasi milenial terhadap perilaku memilih pada pilkada serentak tahun 2020 di DIY.

Data-data yang telah diperoleh melalui proses penelitian di atas selanjutnya ditindaklanjuti dengan analisis data, agar data-data terkait kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam membangun persepsi masyarakat dapat bersifat objektif. Analisis data, menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip dalam Ulber (2010: 339), mengemukakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data yang merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di tangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu. Kedua, penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga, menarik kesimpulan, yaitu verifikasi sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu saksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.

Data-data terkait Partisipasi politik generasi milenial terhadap perilaku memilih pada pilkada serentak tahun 2020 di DIY yang telah dianalisa melalui proses analisis data di atas, selanjutnya dilakukan uji keabsahan data, agar data yang telah diolah dapat diujikan kebenarannya dan tidak bersifat manipulatif ataupun subyektif. Uji keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti dilakukan dengan teknik triangulasi. Moleong (2012: 330) menjelaskan bahwa Triangulasi menjadi cara yang terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi pada waktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Peneliti dapat mengecek kembali temuannya dengan membandingkan berbagai sumber, metode, atau teori.

3. Data dan Pembahasan

Penciptaan tatanan pemerintahan lokal yang baik secara empirik, menekankan pentingnya peran warga negara. Untuk mengukur peran warga dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik, pemahaman terhadap agregasi kepentingan, dan pertanggungjawaban publik (Hanafi, 2014).

Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Anggara (2013: 146):

1. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat semakin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik;
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik;
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang;
4. Konflik antarkelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antarelite, yang dicari adalah dukungan rakyat, terjadi perjuangan kelas menengah melawan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat;
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan, meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

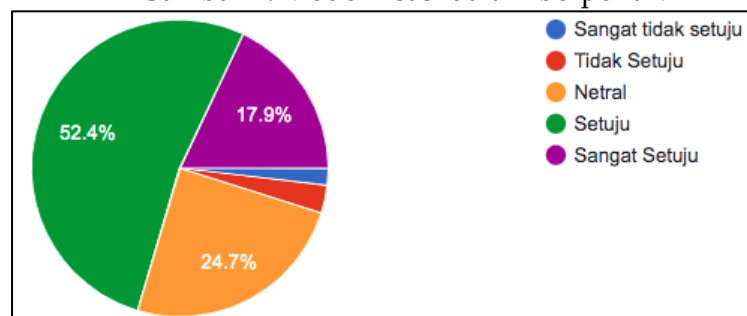
Pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya, para pemilih pemula sering terpengaruh oleh pilihan orang-orang di sekitarnya seperti keluarga dan teman sekelompoknya. Para pemilih pemula ini khususnya yang tinggal di pedesaan, mayoritas mengikuti sikap orang tuanya atau tokoh yang dihormati di lingkungannya. Dalam kaitannya dengan pilihan terhadap partai politik, kaum pemilih pemula ini cenderung meneruskan tradisi keluarga dengan memilih partai politik yang selama ini telah dipilih secara

turun menurun oleh keluarganya dari generasi ke generasi. (Yustiningrum dan Ichwanuddin, 2014)

Bentuk partisipasi politik sangat bergantung pada latar belakang sejarah, kemajuan negara, tingkat pendidikan masyarakat, dan kualitas kesadaran bernegara. Partisipasi politik di pengaruhi oleh 5 hal (Anggara, 2013), yaitu:

1. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat semakin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. Indikator pertama ini dapat dilihat dari dua hal berikut:
 - a. Modernisasi bagi generasi muda membuat semakin kritis dan banyak terlibat menuntut kekuasaan politik. Lebih dari 70% generasi muda menunjukkan bahwa mayoritas setuju dan sangat setuju, bahwa semakin modern generasi muda maka akan semakin kritis dan semakin banyak menuntut dalam hal politik.

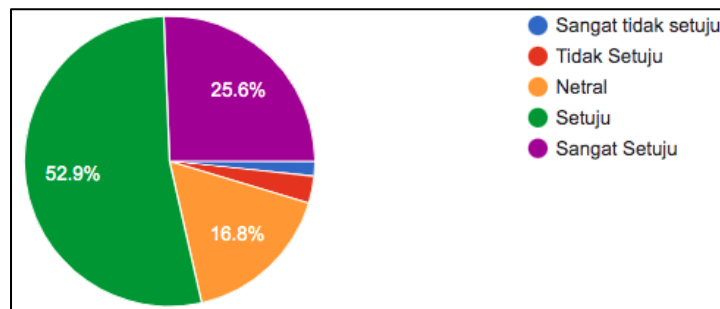
Gambar 1. Modernisasi dalam berpolitik



Sumber: analisis peneliti

- b. Generasi muda lebih banyak berkontribusi dalam mempengaruhi kekuasaan politik melalui media digital. Modernisasi membuat generasi muda lebih banyak memanfaatkan media digital dalam mencari informasi hingga mengekspresikan partisipasi politiknya dalam media tersebut. Generasi muda sebanyak 76% lebih banyak memberikan pengaruh politiknya melalui media digital, artinya partisipasi generasi muda semakin lebih mudah terjangkau ketika menggunakan media tersebut.

Gambar 2. Kontribusi politik secara digital

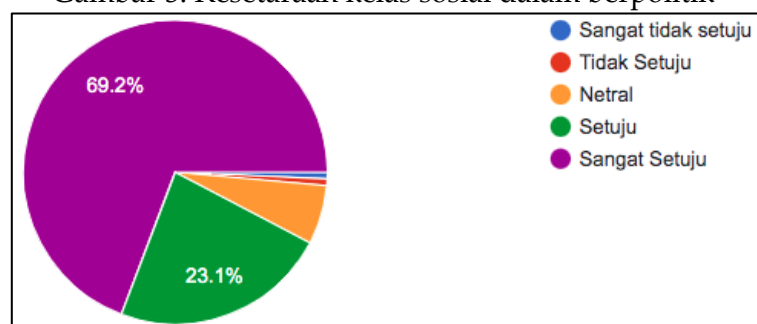


Sumber: analisis peneliti

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum (Budiarjo, 2007). Sejalan dengan data hasil survei di atas, yaitu bahwa politik modern menuntut generasi muda berfikir kritis dan perlu terlibat dalam politik sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. Indikator kedua ini dapat dilihat dari dua hal berikut:
 - a. Setiap warga negara dari berbagai kelas sosial memiliki hak sama untuk memilih siapapun. Dalam hal ini, data survei menunjukkan bahwa hampir 100% generasi muda setuju tidak ada perbedaan kelas sosial dalam hal hak berpolitik.

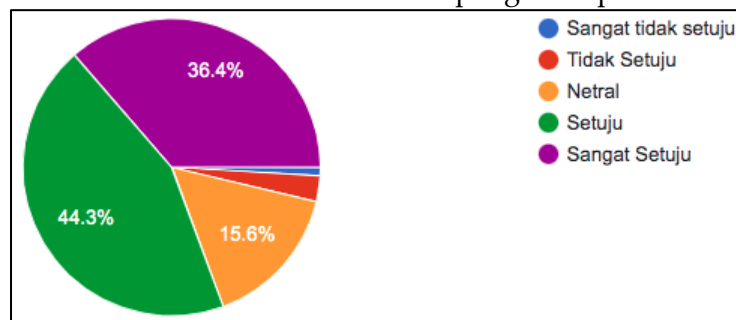
Gambar 3. Kesetaraan kelas sosial dalam berpolitik



Sumber: analisis peneliti

- b. Orang yang telah berpartisipasi dalam pemilu, berarti telah berkontribusi membawa perubahan politik, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya yang lebih baik. Dalam hal ini generasi muda menyatakan lebih dari 70% setuju bahwa partisipasi politik yang telah dilakukan dapat berkontribusi dalam melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun di luar itu data menunjukkan bahwa partisipasi yang telah dilakukan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan. Hal ini dapat disebabkan ketidakpuasan generasi muda terhadap perubahan dalam berbagai aspek kehidupan yang telah berlangsung, seperti tingkat korupsi yang masih signifikan, hingga ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Gambar 4. Politik dalam mempengaruhi perubahan

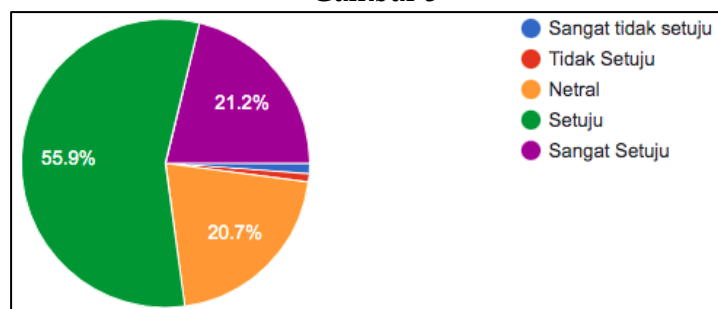


Sumber: analisis peneliti

3. Pengaruh generasi intelektual dan komunikasi massa modern, ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang. Indikator ketiga ini dapat dilihat dari dua hal berikut:
- a. Generasi muda yang berintelektual lebih banyak berpartisipasi dalam menyumbangkan ide kritis dan demokratis. Intelektual bagi generasi muda menjadi poin penting, karena ini yang akan menjadikan partisipasi politik yang berkualitas. Data survei menunjukkan bahwa 76% intelektual berperan penting bagi generasi muda dalam menyumbangkan ide kritis dan demokratis, namun ternyata terdapat 20% generasi muda yang bersifat netral. Netralitas ini dapat dimungkinkan karena generasi

mudah yang berintelektual tidak peduli dengan politik atau bersifat apatis.

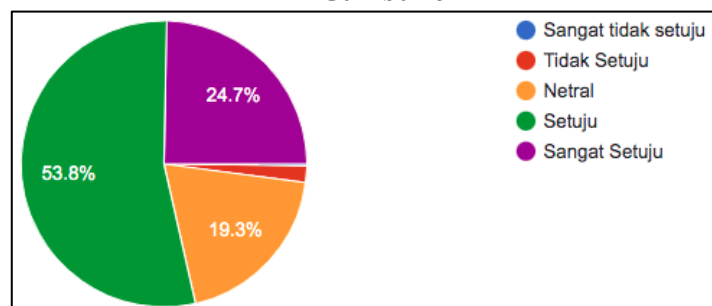
Gambar 5



Sumber: analisis peneliti

- b. Kebebasan ekspresi di media sosial digital merupakan bentuk partisipasi politik yang lebih mudah dan efektif bagi kaum muda. Komunikasi massa modern bagi generasi muda yang berintelektual menjadi alternatif yang mudah dan efektif dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Setidaknya terdapat 79% generasi muda menganggap hal tersebut cukup mudah dan efektif, namun di luar itu masih menilai bahwa ekspresi melalui media sosial digital tidak berdampak signifikan.

Gambar 6



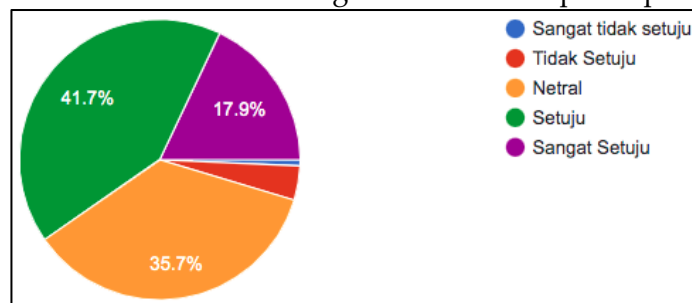
Sumber: analisis peneliti

4. Konflik antarkelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antarelite, yang dicari adalah dukungan rakyat, terjadi perjuangan kelas menengah melawan kaum

aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. Indikator keempat ini dapat dilihat dari tiga hal berikut:

- a. Generasi muda lebih mendukung tokoh yang dinilai baik dari pada mendukung partai politiknya dalam pemilu. Popularitas partai politik juga sangat dipengaruhi oleh para kader yang berasal dari tokoh atau figur publik. Terdapat 60% generasi muda melihat bahwa figur tersebut menjadi daya tarik dari pada partai politik itu sendiri. Tokoh politik dalam partai menjadi penunjang utama terhadap popularitas dalam pemilu, sehingga para pemilih pada umumnya lebih tertarik pada tokoh tersebut tanpa banyak mempertimbangkan latar belakang partainya.

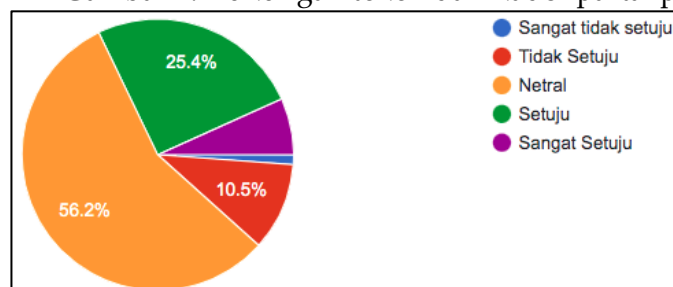
Gambar 6. Dukungan tokoh dalam partai politik



Sumber: analisis peneliti

- b. Generasi muda lebih tertarik pada tokoh yang bukan berasal dari kader partai politik dari pada tokoh yang berasal dari kader partai politik. Lebih dari 56% generasi muda melihat bahwa kader partai atau bukan. Dalam hal ini, generasi muda cenderung mengambil banyak sikap netral dari pada harus menentukan tokoh politik berasal dari kader partai atau bukan.

Gambar 7. Dukungan tokoh dari kader partai politik

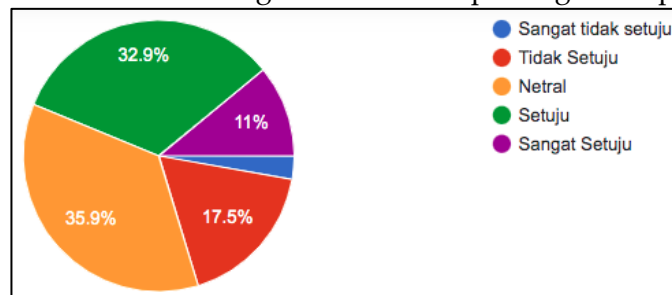


Sumber: analisis peneliti

- c. Konflik kepentingan antar elit politik yang terjadi terus menerus mengakibatkan kaum muda menjadi lebih apatis

atau tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Data menunjukkan bahwa antara generasi muda yang setuju, tidak setuju dan netral berada pada persentase yang tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan antar elit politik tidak menjadi perhatian utama bagi generasi muda untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Elit politik biasanya menggunakan tokoh politik sebagai alat untuk meningkatkan elektabilitas partainya. Tokoh politik ini terkadang menjadi rebutan antar partai politik, bahkan isu-isu tertentu digunakan oleh partai politik digunakan untuk meningkatkan popularitas partainya dan menurunkan popularitas partai lawannya.

Gambar 8. Pengaruh konflik kepentingan elit politik

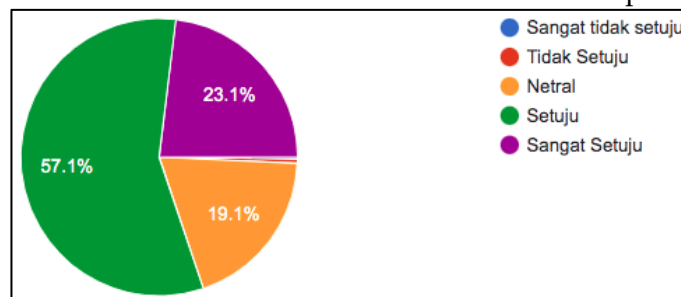


Sumber: analisis peneliti

Pragmatisme terkait erat dengan kecenderungan sikap dan perilaku politik aktual dan konkret yang ditunjukkan oleh elit dan atau aktivis partai politik yang cenderung tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan orientasi ideologis partai politik dimana mereka bernaung (Makhasin, 2016). Ketidaksesuaian elit partai politik dalam orientasi ideologis partainya membuat antar elit saling berhadap-hadapan satu sama lain, baik itu dikarenakan kepentingan pribadi elit yang tidak sesuai ataupun kepentingan partainya yang tidak sesuai. Hal ini mengakibatkan konflik antar elit atau bahkan kelompok elit pemimpin politik dalam suatu kepentingan tertentu, seperti halnya kepentingan pemilu 2024. Namun demikian, di sisi lain hal ini juga penting sebagai kritik sekaligus edukasi politik dalam negara demokrasi, sehingga harapannya bagi generasi muda akan lebih berkualitas dalam menggunakan hak partisipasi politiknya.

5. Keterlibatan pemerintah yang luas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan, hingga meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi terhadap kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. Indikator kelima ini dapat dilihat dari dua hal berikut:
 - a. Peran pemerintah dalam sosialisasi dan edukasi politik pada masyarakat akan meningkatkan partisipasi kaum muda untuk sadar dan terlibat menggunakan hak pilih. Kedua hal di atas adalah menjadi poin penting bagi generasi muda agar lebih paham makna berpolitik dan lebih banyak menggunakan partisipasi politiknya. Data menunjukkan terdapat 80% yang setuju dan sangat setuju terhadap hal tersebut. Namun masih terdapat 19% generasi muda menilai netral, karena dapat dikatakan bahwa peran pemerintah dalam sosialisasi dan edukasi politik tidak berdampak pada partisipasinya. Paling tidak terdapat dua hal mengapa hal tersebut dikatakan tidak berdampak bagi generasi muda, yaitu dikarenakan pemerintah yang tidak dapat memberikan pemahaman yang mendasar terkait hakikat partisipasi politik, atau dikarenakan generasi muda itu sendiri yang bersikap apatis terhadap partisipasi politik yang dinilai sudah tidak dapat dipercaya mampu merubah tatanan negara yang lebih baik.

Gambar 9. Peran sosialisasi dan edukasi politik

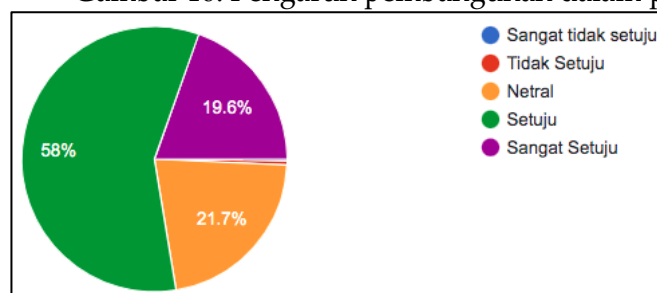


Sumber: analisis peneliti

- b. Pembangunan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya akan semakin meningkatkan partisipasi generasi muda. Hampir 80% generasi muda menilai bahwa pembangunan pemerintah yang semakin meluas maka akan semakin merangsang partisipasi politik. Namun masih terdapat 21% pembangunan pemerintah tersebut dinilai tidak dapat meningkatkan partisipasi politik. Hal ini dapat

dikarenakan faktor generasi muda yang menilai bahwa pembangunan yang belum optimal atau dapat juga dikarenakan pembangunan tersebut tidak berhubungan dengan partisipasi politik yang telah dilakukan generasi muda.

Gambar 10. Pengaruh pembangunan dalam politik

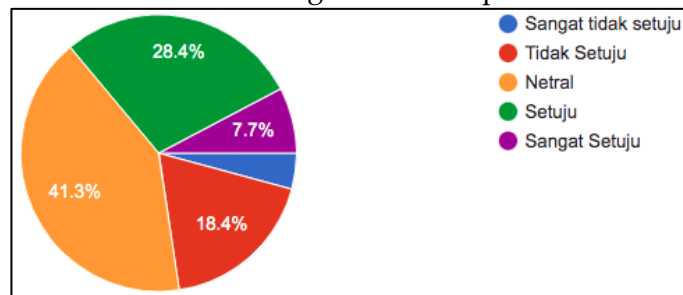


Sumber: analisis peneliti

Berdasarkan kelima indikator di atas dapat dilihat bahwa partisipasi politik generasi muda menunjukkan nilai yang cukup tinggi, yaitu paling tidak di terdapat 70% menilai bahwa partisipasi politik bagi generasi muda cukup penting sebagai bentuk utama peran merubah negara menjadi lebih baik. Namun masih terdapat 24% generasi muda menilai bahwa partisipasi politik masih dianggap tidak penting, yaitu dengan memilih netral pada penentuan sikap politik tersebut. Sementara itu, di luar persentase tersebut generasi muda masih menilai pesimis terhadap peran partisipasi politik. Hal ini dapat disebabkan karena ketidakpercayaan generasi muda terhadap fungsi dari partisipasi politik itu sendiri yang memberikan dampak terhadap perubahan negara yang lebih baik. Selain itu, pemahaman terhadap partisipasi politik tersebut juga masih dinilai kurang yang disebabkan karena edukasi politik yang kurang ataupun disebabkan karena generasi muda belum melihat perubahan yang signifikan sebagai dampak dari aktivitas elit politik negara.

Selain berdasarkan pada lima indikator di atas, dalam hal ini peneliti juga berupaya melihat proyeksi generasi muda dalam menghadapi politik pemilu 2024 yang akan datang. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan sikap generasi muda dalam menyiapkan pemilu 2024, yaitu sikap terkait dengan kebijakan pemilu serentak, penggunaan hak partisipasi politik, hingga analisis partai politik yang berkuasa.

Gambar 11. Regulasi dalam pemilu serentak



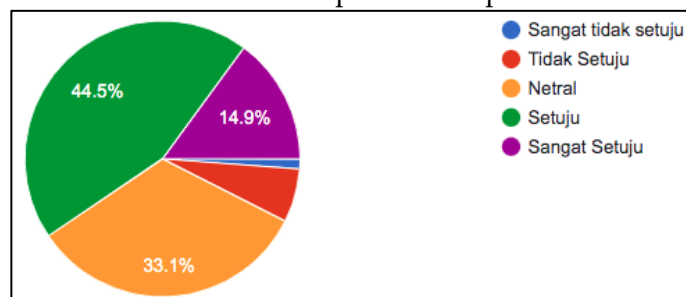
Sumber: analisis peneliti

Pertama, peneliti melihat bahwa regulasi pemilu serentak mendapat perhatian masyarakat pada tingkat partisipasi pemilih yang semakin meningkat. Pemilu serentak meliputi Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) yang meliputi Pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, hingga pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini mendapatkan tanggapan oleh generasi muda yang cukup beragam, mulai dari 41% bersikap netral, 36% bersikap setuju dan sangat setuju, serta 23% menyatakan sikap tidak setuju dan sangat tidak setuju apabila pemilu dilakukan secara serentak.

Model keserentakan pemilu yang paling ideal adalah pemilu serentak nasional dan lokal. Pertama, pemilu nasional untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD, kemudian dilanjutkan beberapa waktu setelahnya dengan pemilu serentak lokal untuk memilih Gubernur, Bupati/WaliKota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Model keserentakan pemilu tersebut dapat menjadi solusi terhadap kekurangan dan

permasalahan yang dialami pada pemilu serentak tahun 2019 khususnya pada partisipasi pemilih, kinerja penyelenggara pemilu, serta penguatan sistem presidensial dan penguatan sistem pemerintahan daerah (Amir, 2020). Sejalan dengan hal ini, generasi muda dapat dikatakan tidak banyak yang menyatakan setuju, yaitu tidak lebih dari 41%. Artinya hal ini masih membuka peluang untuk dilakukan evaluasi terkait kebijakan pemilu serentak tersebut agar lebih efektif dan efisien.

Gambar 12. Partisipasi dalam pemilu serentak



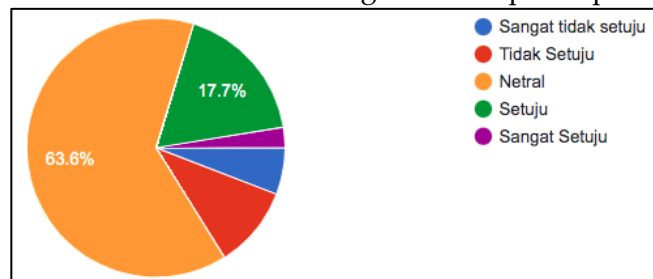
Sumber: analisis peneliti

Kedua, berhubungan dengan generasi muda yang akan berpartisipasi untuk menggunakan hak pilihnya secara penuh untuk memilih apabila Pilpres, Pileg, hingga Pilkada dilaksanakan secara serentak menjadi satu kali pemilihan. Data hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 59% generasi muda tetap akan menggunakan hak partisipasi politiknya dalam pemilu 2024 meskipun dilaksanakan secara serentak. Namun terdapat 33% menyatakan generasi muda lebih bersikap netral dalam hal tersebut, baik dikarenakan faktor yang tidak paham terhadap regulasi pemilu serentak ataupun dapat dikarenakan faktor apatis terhadap pelaksanaan pemilu serentak.

Dari sisi partisipasi pemilih, meskipun pada Pemilu 2019 persentase pemilih sudah meningkat pada pemilu-pemilu sebelumnya, akan tetapi belum dicapainya keseimbangan antara perolehan suara dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif. Terlalu banyaknya calon yang harus dipilih, sehingga banyak masyarakat asal pilih maupun golput dalam pemilihan legislatif. Pemilih sulit untuk memberikan rasionalitas dalam memberikan suara akibat

terlalu banyaknya pilihan atau surat suara. (Amir, 2020) Bagi generasi muda yang tergolong sebagai pemilih pemula tentunya pemilu serentak menjadi tantangan untuk lebih berfikir dalam memahami para calon yang dipilih terlalu banyak, sehingga persentase 7% dinilai cukup kecil yang dapat disebabkan karena generasi muda akan lebih mudah menyesuaikan dalam memahami politik modern, yaitu dengan memanfaatkan media sosial dan media digital yang lebih efektif dan efisien dalam mempengaruhi keputusan politik.

Gambar 13. Dukungan koalisi partai politik



Sumber: analisis peneliti

Ketiga, dukungan generasi muda terhadap konstelasi partai politik yang berkuasa sebagai koalisi di pemerintah pada tahun 2019-2024 berlanjut pada pemenang kekuasaan Pemilu 2024. Dalam hal ini, generasi muda cenderung lebih bersifat netral dalam penentuan partai politik yang akan berkuasa pada periode 2024-2029. Lebih dari 63% data menunjukkan bahwa generasi muda tidak memilih partai mana yang akan berkuasa. Hal ini dapat dikatakan bahwa generasi muda tidak memahami orientasi hingga proyeksi suatu partai politik tertentu yang berperan sebagai koalisi atau oposisi dalam konstelasi negara, atau juga dapat disebabkan karena generasi muda menginginkan adanya orientasi partai politik baru atau partai politik lama yang melakukan terobosan baru dalam konstelasi negara.

Sementara itu, dapat kita lihat bahwa data menunjukkan 20% generasi muda menginginkan partai politik koalisi saat ini tetap berkuasa sebagai pemenang Pemilu 2024, sedangkan 16% generasi muda menilai partai politik saat ini sudah tidak perlu untuk berkuasa lagi pada periode berikutnya. Kedua hal ini menunjukkan kepuasan atau ketidakpuasan generasi muda terhadap partai politik yang menguasai rezim saat ini.

Namun kedua persentase tersebut yang sangat rendah dari pada sikap netralnya yang sangat tinggi, sehingga krisis politik menjadi tantangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Krisis politik ini bila tidak diatasi bisa menimbulkan delegitimasi demokrasi berkembang di Indonesia selama ini. Berbagai keluhan-kesah dan kekecewaan publik itu berkembang luas di kalangan masyarakat, bukan hanya di kalangan elit kelas menengah atau kalangan terdidik dan terpelajar yang relatif dekat dan memiliki akses informasi terhadap berbagai praktek politik di kalangan elit, tetapi juga berkembang di kalangan kelas menengah ke bawah yang langsung merasakan dampak dari krisis politik yang sedang berlangsung. Meskipun respon diberikan berbeda-beda diantara satu kelompok dengan kelompok lainnya, hal itu menandakan krisis politik dan delegitimasi demokrasi kini sedang berlangsung (Trijono, 2011). Rendahnya nilai persentase yang menginginkan partai politik untuk tetap berkuasa menunjukkan bahwa prestasi dari partai koalisi tersebut sangat rendah, sementara itu rendahnya pula nilai persentase yang tidak menginginkan koalisi partai politik untuk tetap berkuasa menunjukkan bahwa generasi muda tidak siap dengan partai oposisi atau partai lain di luar koalisi sebagai pengganti penguasa di pemerintah. Di sisi lain, netralitas yang sangat tinggi menunjukkan bahwa pada saat ini generasi muda lebih bersikap netral dalam pemilu 2024, atau juga dapat dikatakan mayoritas generasi muda tidak paham ataupun tidak peduli pada konstelasi peran koalisi dan oposisi partai politik dalam pemerintah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis di atas menunjukkan bahwa peran generasi muda dalam partisipasi politik cukup tinggi, yaitu dengan melihat generasi muda memiliki peran penting sebagai bentuk utama peran merubah negara menjadi lebih baik. Partisipasi politik generasi muda didukung dengan adanya faktor modernisasi sarana dan prasarana, kesetaraan kelas sosial, intelektualitas generasi muda, konflik elite politik yang memerlukan perhatian publik, hingga keputusan politik yang dinilai penting harus terlibat dalam bagian penyelesaian masalahnya.

Pada sisi lain, generasi muda dapat dikatakan belum memiliki kesiapan yang baik untuk menghadapi Pemilu 2024. Hal ini dapat terlihat pada sikap generasi muda yang menilai netral yang sangat tinggi dalam memutuskan partai politik yang berkuasa pada periode rezim yang akan datang. Regulasi Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak juga tidak menjadi perhatian utama bagi generasi muda, walaupun pada akhirnya generasi muda masih akan tetap tinggi dalam menggunakan hak suara dalam partisipasi politiknya. Dengan demikian, yang perlu disiapkan saat ini adalah bukan hanya melakukan sosialisasi dan edukasi politik terhadap penggunaan hak suara dalam Pemilu 2024, melainkan yang lebih utama adalah pemahaman terhadap orientasi dan proyeksi partai politik dan tokoh politik yang akan mengisi konstelasi negara yang lebih baik ke depan.

5. Daftar Pustaka

- Sahya, A. 2013. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Farisa, F. Chusna. 2022. KPU Calls Voter Participation in the 2019 Election Reached 81 Percent, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>, accessed 12 Oktober 2022.
- Hardani, dkk. 2021. Qualitative & Quantitative Research Methods, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Nawawi, Hadari. 2012. Metode Penelitian bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press.
- Trijono, Lambang. (2011). The Realization of Democratic Politics: Agency Politics and the Revitalization of Democratic Institutions, Vol. 15, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hal. 93-110.
- Moleong, L. J. 2012. Qualitative Research Methodology, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Amir, M. (2020). The Most Ideal Simultaneous Election 2024 Based On The Decision Of The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia, Vol. 23, Jurnal Ilmiah Hukum, hal115-132.
- Budiardjo, M. 2007. Fundamentals of Political Science, Jakarta: Gramedia.

- Hanafi, R. Imawan. (2014). Direct Election of Regional Heads in Indonesia: Some Critical Notes for Political Parties, Vol. 3, Jurnal Penelitian Politik, hal. 1-16.
- Lutfi, M. (2016). Ideological Orientation and Political Pragmatism Model Formation of Coalition in Simultaneous Regional Head Elections in Central Java 2015, Vol. 19, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hal. 234-250.
- Yustiningrum, RR E. dan Ichwanuddin, W. (2014). Political Participation and Voting Behavior in the 2014 Election, Vol. 12, Jurnal Penelitian Politik, hal. 117-135.
- Ulber, S. 2010. Social Research Methods. Bandung: Refika Aditaman.
- Hanafi, Ridho Imawan. (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik. Jurnal Penelitian Politik.11 (2), hal. 1-16..